

PERANAN PERS DALAM PENYEBARAN KESADARAN NASIONAL

Oleh : Retor AW Kaligis*

Abstract

Press is the face of the development of society. Bennedict Anderson claims that emphasizes the importance of the benefits of capitalism, especially the print capitalism, in spreading the ideas of national consciousness is only a limited effect. Although the press has a role for the independence movement, print capitalism as the standard rules for the dissemination of the idea of nationalism in the Netherlands Indies did not show the development of capitalism and technology in this country. The spread of national consciousness has not been evenly distributed. The pattern of distribution and readership is elitist that shows the development of distribution networks educated elite groups are still very limited.

In the era of independence, the print media has been also continuing to show the distribution of the educated. The pattern of distribution and readers is not equitable to all corners of Indonesia, but still tends to be concentrated in big cities in Java. Reading culture in Indonesian society is still low. When the reading culture is not high, the private television developed, so that far more people watch television than read a newspaper dan magazine.

Keywords: press, national consciousness, reading culture

Abstrak

Pers merupakan wajah perkembangan masyarakat. Klaim Bennedict Anderson yang menekankan pentingnya keunggulan kapitalisme, terutama kapitalisme cetak, dalam menyebarkan gagasan kesadaran nasional hanya berlaku terbatas. Walaupun pers memiliki peranan bagi pergerakan kemerdekaan, kapitalisme cetak sebagai aturan standar bagi penyebaran nasionalisme di masa Hindia Belanda tidak menunjukkan perkembangan kapitalisme dan teknologi di negeri ini. Penyebaran kesadaran nasional belum merata. Pola sebaran dan pembacanya bersifat elitis yang menunjukkan perkembangan sebaran jaringan kelompok-kelompok elite terdidik yang masih sangat terbatas.

Di era kemerdekaan, media massa cetak juga tetap menunjukkan sebaran kalangan terdidik. Pola sebaran dan pembaca tidak merata ke seluruh pelosok Indonesia, namun masih cenderung terpusat di kota-kota besar di Pulau Jawa. Budaya baca masyarakat Indonesia juga masih rendah. Ketika budaya baca belum tinggi, televisi swasta berkembang, sehingga masyarakat jauh lebih banyak menonton televisi ketimbang membaca koran dan majalah.

Kata Kunci: pers, kesadaran nasional, budaya baca

1. Pendahuluan

Kesadaran nasional sebagai satu bangsa Indonesia baru muncul pada awal abad ke 20. Dari sejarahnya, lahirnya kesadaran bangsa-bangsa Asia, termasuk di Hindia Belanda, untuk bangkit mengalahkan bangsa-bangsa Eropa yang menjajahnya diinspirasi kemenangan Jepang atas Rusia pada perang tahun 1905, yang membuktikan bahwa bangsa-bangsa di Asia dapat mengalahkan

bangsa-bangsa dari Barat.¹ Kaum terdidik di Hindia Belanda juga mempelajari gerakan Turki Muda untuk mencapai perbaikan nasib yang menimbulkan revolusi anti kaum kolot tahun

¹ Tirtoprodjo, Susanto. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, Jakarta: PT Pembangunan Jakarta, 1982, h. 8. Selain itu, Kusuma Sumantri, Iwa (1963). *Sejarah Revolusi Indonesia: Masa Perjuangan Sebagai Perintis Revolusi (Jilid Pertama)*, Jakarta: (tanpa penerbit), 1993, h. 13-14 mencatat timbulnya kepercayaan kepada diri sendiri ini lebih diperkuat oleh bangkitnya gerakan kebangsaan di India, kemudian Revolusi tahun 1911 di Tiongkok dan khusus pula oleh kemenangan Pemimpin Besar Tiongkok Dr Sun Yat Sen merebut Canton.

1908.² Berita-berita dari luar negeri masuk ke sini melalui media massa.³

Pergerakan politik yang teroganisir dan melampaui identitas daerah dimunculkan oleh pemuda-pemuda berpendidikan Barat yang berkembang sejak dimulainya Politik Etis awal abad ke 20. Kebanyakan dari mereka berasal dari golongan priyayi, golongan kecil orang-orang profesional di kota-kota besar, dan keluarga pedagang luar pulau Jawa.

Para pemuda yang berpendidikan Belanda itu mendirikan organisasi pemuda tanpa meninggalkan identitas kedaerahannya. Mereka berstatus sosial tinggi, dikirim dari kampung halamannya untuk memperoleh pendidikan lanjutan di Pulau Jawa. Dari kalangan seperti ini lahir berbagai organisasi pemuda seperti *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Celebes*, *Jong Minahasa*, *Sekar Roekoen*, dan *Jong Bataks Bond*. Digunakannya bahasa Melayu (Indonesia) dan bukannya bahasa Belanda sebagai bahasa persatuan cukup menarik karena sebetulnya para pemuda dari berbagai suku ini adalah kaum terdidik yang terbiasa menggunakan bahasa Belanda. Tapi di sini para pemuda berhasil memilih akar sosio-historisnya, yakni bahasa Melayu yang sudah secara luas dipakai dalam perdagangan di nusantara. Bahasa Melayu kemudian berkembang penggunaannya menjadi bahasa buku yang ditulis dalam roman-roman sejak awal abad ke-20. Di tengah keinginan untuk menyambut zaman baru menuju kemerdekaan, bahasa Melayu yang egaliter cocok untuk mempersatukan para pemuda dari berbagai latar belakang itu.

Usaha persatuan dilakukan para pemuda melalui pencaangan Sumpah Pemuda, sebagai hasil kesepakatan Kongres II Pemuda di Jakarta

tanggal 28 Oktober 1928, yang mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebagai kebalikan dari Kongres I Pemuda tahun 1926 yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar, pada Kongres bulan Oktober 1928 ini bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu (Indonesia). Sumpah Pemuda menjadi perpisahan simbolis atas bahasa kolonial dalam realitas publik.⁴

2. Peran Media Massa di Era Pra Kemerdekaan

Benedict Anderson menekankan pentingnya keunggulan kapitalisme, terutama kapitalisme cetak, dalam menyebarkan gagasan identitas nasional. Dikatakan Anderson, pengalaman sejarah nasionalisme di Eropa Barat, Amerika, dan Rusia telah menyediakan seperangkat bentuk aturan standar bagi nasionalisme yang mana sesudahnya kaum elite nasionalis di Asia dan Afrika memilih salah satu diantaranya. Karenanya, nasionalisme memerlukan teknologi baru dan bentuk baru dari organisasi untuk memberikan pengaruhnya. Teknologi mesin cetak mendorong berkembangnya bahasa nasional sebagai sarana komunikasi antar anggota bangsa, sehingga komunitas yang besar itu saling mengenal satu sama lain sebagai satu bangsa. Struktur dasar dua bentuk pembayangan yang pertama berkembang di Eropa di abad delapan belas: novel dan surat kabar, merupakan bentuk wahana yang menyediakan cara-cara teknis “mewujudkan” jenis komunitas terbayang yang adalah suatu bangsa.⁵

Anderson menambahkan dalam buku *Spectre*:

“...‘derivative discourse’, and ‘imitation’ in understanding the remarkable planetary spread, not merely of nationalism, but of a profoundly standardized conception of politics, in part by reflecting on the everyday practices, rooted in industrial material civilization, that have displaced the cosmos to make way for the world.”⁶

² Pringgogidgo, AK. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1986, h. xi.

³ Berita-berita tersebut masuk ke Hindia Belanda antara lain dengan perantara majalah “Bintang Hindia” pimpinan Dr. Abdul Rivai dan koran berbahasa Melayu “Medan Prijaji” pimpinan Tirto Adhi Suryo. Koran “Medan Prijaji” diterbitkan di Bandung pada 1907 sebagai koran yang membawa suara Sarekat Prijaji –yakni organisasi yang bertujuan memajukan anak-anak priyayi melalui pendidikan dan beasiswa. Tapi dalam perkembangannya, isi koran “Medan Prijaji” tidak sebatas pada kepentingan golongan priyayi, melainkan meluas ke seluruh golongan bumiputera di Hindia Belanda. Lihat *ibid*, h. 14 dan Shiraishi, Takashi. *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926*, Ithaca: Cornell University Press, 1990, h. 33-4. Adapun Hering, Bob dalam *Soekarno Bapak Indonesia Merdeka, Sebuah Biografi 1901-1945*, Jakarta: Hasta Mitra, 2003, h.56 mengatakan, RM Tirto Adhi Soerjo juga dianggap sebagai “Bapak Jurnalisme Indonesia” karena korannya *Medan Prijaji*, terbit pertama 1 Januari 1907, adalah koran yang pertama diterbitkan dan dikelola oleh bumiputera.

⁴ Lihat Foulcher, Keith. *Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Penciptaan Atas Sebuah Simbol Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Komunitas Bambu, 2000, h. 4-8.

⁵ Lihat Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, 1991, Chapter 3: *The Origins of National Consciousness*, Chapter 6: *Official Nationalism and Imperialism*, and Chapter 7: *The Last Wave*.

⁶ Anderson, Benedict. *The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia and the World*. London: Verso, 1998, h. 29.

Ia berpendapat bahwa peran kapitalisme cetak terlihat sangat menonjol dalam proses transformasi sosial di benua Amerika. Meski sama-sama berasal dari satu bangsa dan beragama yang sama (Katolik), orang-orang Spanyol yang tinggal di benua Amerika terbagi-bagi dalam banyak negara, seperti Argentina, Meksiko, Uruguay, dan Paraguay. Berbeda dengan orang-orang Inggris yang tinggal di benua Amerika yang hanya terbagi dalam dua negara: Kanada dan Amerika Serikat. Menurut Anderson, “kegagalan” orang-orang Spanyol di Amerika dalam menghasilkan nasionalisme Pan-Amerika-Spanyol secara permanen menunjukkan tingkat perkembangan kapitalisme dan teknologi pada akhir abad kedelapan belas, sekaligus mencerminkan ketertinggalan “lokal” kapitalisme dan teknologi Spanyol berkaitan dengan ruang lingkup administratif kemaharajaannya.⁷

Di Hindia Belanda, kapitalisme cetak dipandang berperan untuk menyebarkan bahasa Melayu dan menyebarkan gagasan dunia pergerakan.⁸ Media cetak zaman pergerakan tersebut telah menjalankan prinsip kapitalisme cetak, yakni mempunyai pembagian kerja di redaksi dan usaha, diproduksi massal secara mekanik, memiliki sirkulasi melalui penjualan di kios-kios, serta mengandalkan iklan. Media-media ini melakukan salah satu fungsi penting pers, *modelling* (pemodelan): menjadi “kamus-kamus politik” yang menyebarkan istilah-istilah baik yang berbahasa Melayu, serapan, maupun asing, seperti *vergadering*, kongres, *afdeling*, mogok, *voordracht*, *bestuur*, *volksraad*, nasionalis, *politicus*, dan *verkiezing*. Para pembaca bukan hanya memperoleh informasi-informasi aktual, tetapi juga disatukan pemahamannya terhadap bahasa.⁹

⁷ Anderson, Benedict. *Imagined Communities*, op.cit, h. 61-63.

⁸ Penerbitan pers di Hindia Belanda pertama kali diperkenalkan oleh golongan Indo, disusul oleh kalangan Tionghoa peranakan. Kepada keduanya kaum bumiputera berguru, lalu aktif sebagai penerbit atau pemimpin redaksi. Pada tahun 1890 hanya terdapat 8 penerbit pers berbahasa Melayu dan daerah, naik menjadi 18 pada 1905, dan kemudian menjadi 36 pada 1910. Berkembangnya penerbitan pers ditunjang pula oleh UU Pers yang baru tahun 1906 menggantikan sistem pengawasan pers sebelum cetak (*precensorship*) dengan pengawasan pers sesudah cetak (*post-censorship*). Media yang berperan dalam pergerakan dapat disebut surat kabar *Medan Prijaji* dibawah pimpinan RM Tirta Adhi Suryo yang mulai terbit tahun 1907, jurnal *Doenia Bergerak* pimpinan Mas Marco Kartodikromo (1914), kemudian diikuti *Islam Bergerak* (1917), *Boeroeh Bergerak* (1920), dan *Ra'jat Bergerak* (1923), serta *Fikiran Ra'jat* yang merupakan media Partai Indonesia (Partindo) era 1930-an. Lihat Shiraiishi, Takashi. *An Age in Motion*, op.cit, h. 32.

⁹ Lihat Anderson, Benedict, ‘Languange, Fantasy, Revolution: Java 1900-1950’ dalam Lev, Daniel S and Ruth McVey (eds).

Kebijakan Politik Etis Pemerintah Kolonial Belanda melahirkan diferensiasi sosial di masyarakat Hindia Belanda, yakni munculnya kelas menengah pedagang, kaum pemuda terdidik dari kalangan priyayi, pegawai pemerintahan, dan pedagang, serta berkembangnya kaum buruh. Dengan penduduknya yang banyak dan mulai terdidik, kaum industrialis Barat mengharapkan adanya peningkatan daya beli penduduk sehingga dapat menjual barang dagangan di Hindia Belanda. Liberalisasi ekonomi menjadikan periklanan berkembang yang berdampak pada pertumbuhan kapitalisme cetak.

Namun media massa cetak merupakan cermin perkembangan masyarakat. Pola sebaran dan pembacanya bersifat elitis, menunjukkan perkembangan sebaran jaringan kelompok-kelompok elite terdidik yang masih sangat terbatas¹⁰. Sensus penduduk tahun 1930 mencatat bahwa hanya 6% penduduk menyatakan dapat membaca dan menulis, serta hanya 0,3% dapat membaca dan menulis dalam bahasa Belanda. Mereka yang berkesempatan memperoleh pendidikan itu lalu membentuk kelompok-kelompok kecil dan memperoleh tempat persemaian tentang kesadaran “nasional”. Surat-surat kabar menjadi media yang penting untuk menyebarkan bahan-bahan pemikiran di antara lapisan elite itu.¹¹

Penyebab terpenting terlambatnya kehadiran pers (berbahasa) Indonesia adalah akibat lemahnya posisi ekonomi orang Indonesia sehingga sering tidak mampu menerbitkan suratkabarnya sendiri. Karena tidak adanya kelas menengah yang bermodal kuat, maka sukar bagi surat-surat kabar bumiputera untuk mendapatkan iklan.

Liberalisasi ekonomi tidak memberikan kesempatan yang cukup baik untuk naiknya kelas intelektual maupun para pedagang kelas menengah bumiputera. Sampai sesudah Perang Dunia I, sangat sedikit orang pribumi terpelajar yang menduduki jabatan sebagai pegawai sipil dan hal itu terbatas pada eselon yang lebih rendah. Bahkan sekitar setahun sebelum akhir era pemerintahan Hindia Belanda tahun 1942, hanya

Making Indonesia: Essays on Modern Indonesia in Honor of George McT. Kahin, Ithaca, NY: Cornell University, 1996, h.32-35.

¹⁰ Koran dan majalah di Jawa dan luar Jawa terbatas di kota-kota tertentu, seperti Semarang, Batavia, Bogor, Surabaya, Padang, Makassar, dan Manado. Adam, Ahmat. *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*, Jakarta: Hasta Mitra, Pustaka Utan Kayu, dan Perwakilan KITLV-Jakarta, 2003, h. 314-8.

¹¹ Takashi. *An Age in Motion*, op.cit, h. 30-32.

ada 221 orang Indonesia dari 3.039 pegawai eselon atas dalam struktur pemerintahan kolonial.¹²

Pers berbahasa Indonesia umumnya berumur pendek, hanya bertahan beberapa tahun atau bahkan ada yang dalam hitungan bulan saja. Tiras mayoritas surat-surat kabar itu kecil, sekitar 1000-2000 pelanggan. Selain itu, buta huruf, lambatnya kedatangan proses kesadaran, dan terus populernya surat-surat kabar Eropa di kalangan orang Indonesia terdidik terpelajar, ikut menjadi penyebab.¹³

Walaupun pers memiliki peranan bagi pergerakan kemerdekaan, kapitalisme cetak sebagai aturan standar bagi penyebaran nasionalisme di masa Hindia Belanda tidak menunjukkan perkembangan kapitalisme dan teknologi di negeri ini. Klaim Benedict Anderson yang menekankan pentingnya keunggulan kapitalisme, terutama kapitalisme cetak, dalam menyebarkan gagasan kesadaran nasional, hanya berlaku di kalangan terbatas karena di tengah lemahnya posisi orang Indonesia dalam pemodal dan teknologi, serta mayoritas rakyat yang buta huruf, distribusi media cetak hanya menunjukkan sebaran golongan berpendidikan yang jumlahnya masih sangat terbatas dan berada di kota-kota tertentu. Mayoritas media cetak juga tidak berumur panjang. Namun, di tengah keterbatasan penguasaan teknologi dan penyebarannya, tidak seperti kegagalan orang-orang Spanyol di Amerika dalam menghasilkan nasionalisme Pan-Amerika-Spanyol, luas wilayah negara Indonesia yang terbentuk termasuk terbesar di dunia.

Penyebaran kesadaran nasional belum merata hingga ke pelosok daerah. Organisasi-organisasi bentukan Jepang, terutama organisasi militer PETA, dan perlawanan-perlawanan rakyat di zaman Jepang, justru berperan menyebarkan kesadaran nasional secara luas hingga ke desa-desa, setidaknya pada berbagai tempat di Pulau Jawa dan Sumatera. Dari kalangan terdidik, serta tokoh-tokoh masyarakat dan agama baru kesadaran nasional disebarkan di kalangan rakyat

biasa melalui saluran-saluran organisasi yang memperoleh kemajuan berarti di masa pendudukan Jepang.

Di masa penjajahan Jepang, bahasa Belanda dilarang dan bahasa Indonesia (Melayu) menjadi bahasa resmi. Hal ini membuat pertama kalinya bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi. Meski sudah dinyatakan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia bukanlah digunakan mayoritas rakyat, sehingga dengan ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi mendorong perkembangannya.¹⁴

3. Peran Media Massa di Masa Kemerdekaan

Media massa berperan dalam menyebarkan Proklamasi Kemerdekaan ke kantong-kantong perjuangan di daerah dan tokoh-tokoh pergerakan yang berada di daerah berperan menyebarkannya hingga ke pelosok-pelosok.¹⁵

Yang perlu dicatat di sini adalah peranan jaringan radio pemerintah, Radio Republik Indonesia (RRI) yang didirikan pada 11 September 1945 sebagai konsorsium delapan stasiun lokal yang sebelumnya merupakan jaringan di bawah kontrol Jepang. Operasi mereka ditempatkan di bawah Departemen Penerangan mulai April 1946. RRI memainkan peranan yang besar dalam menyampaikan informasi perjuangan kemerdekaan kepada komunitas nasional dan internal. RRI kemudian membangun divisi luar negeri, *Voice of Indonesia*, untuk menyiarkan gelombang pendek yang ditujukan kepada khalayak luar negeri.¹⁶

Meski terdapat sejumlah media cetak yang juga ikut berperan, tapi di tengah mayoritas rakyat yang buta huruf dan karakteristik radio yang audio serta kemampuannya dalam menyampaikan pesan secara lebih cepat membuat media elektronik ini

¹² Lihat Kahin, George McT. *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1952, h. 34-35.

¹³ Misalnya, surat kabar populer di kalangan kaum pergerakan *Soeloeh Indonesia Moeda* dan *Fadjar Asia* hanya punya pelanggan masing-masing 1500 dan 1000 orang pada bulan Januari 1928. Usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan keuangan dengan menerbitkan saham sering tidak berhasil. Lihat Maters, Mirjam. *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial Antara Kebebasan dan Pemberangusan 1906-1942*, Jakarta: Hasta Mitra, Pustaka Utan Kayu, dan KITLV, 2003, h. 47-247.

¹⁴ Bahasa Melayu lebih banyak digunakan di kota-kota besar sebagai bahasa penghubung untuk urusan perdagangan, sedangkan pergaulan kaum intelektual dari berbagai suku lebih banyak menggunakan bahasa Belanda. Adapun bahasa rakyat terbanyak adalah bahasa Jawa karena sepertiga penduduk Indonesia adalah suku Jawa. Kusuma Sumantri, Iwa, *Sejarah Revolusi Indonesia*, *op.cit.*, h. 83.

¹⁵ Di Sulawesi, misalnya, Gubernur Sulawesi GSSJ Ratulangi menugaskan N. Hajarati dan Lanto Daerang Pasewang untuk berkeliling Sulawesi Selatan dengan tugas mengupayakan agar raja-raja di sana mendukung proklamasi RI. (Wawancara mantan Staf Gubernur Ratulangi, Abdul Madjid, tanggal 13 Nopember 2006). Abdul Madjid saat berumur 28 tahun diangkat menjadi Staf Gubernur Sulawesi tak lama setelah Proklamasi.

¹⁶ Sen, Krishna dan David T. Hill. *Media, Budaya, dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan PT Media Lintas Inti Nusantara, 2001. h. 95.

sangat diandalkan dalam menyebarkan informasi ke kantong-kantong pendukung kemerdekaan.

Pada era Demokrasi Liberal periode 1950-an, peran partai politik sangat dominan dalam kehidupan politik. Pertentangan ideologi dan politik berlangsung dari tingkat nasional hingga desa-desa. Pada sejumlah tempat di tingkat akar rumput, konflik ideologi dan politik terjadi secara fisik ketika sebuah desa bentrok dengan desa lain karena perbedaan aliran politik. Pers menjadi corong partai dimana partai-partai besar memiliki koran sendiri. Para elite partai-partai politik menjanjikan cita-cita berdasarkan aliran politik masing-masing untuk menyakinkan rakyat mendukungnya.

Dalam keadaan belum tuntasnya perdebatan soal ideologi negara di Konstituante dan munculnya pemberontakan daerah (PRRI/Permesta). Pemerintah mulai menggunakan Sumpah Pemuda tahun 1928 untuk mengampanyekan persatuan dan kesatuan nasional. Untuk pertama kali peringatan Sumpah Pemuda dirayakan dalam skala besar-besaran pada tahun 1957. Sekolah-sekolah di Jakarta menyelenggarakan acara pengibaran bendera dan pembacaan sumpah. Sebuah arak-arakan pemuda diselenggarakan di jalan-jalan ibukota pada malam hari. Soekarno menggunakan perayaan itu sebagai serangan terhadap separatisme. Setahun kemudian, ketika Presiden Soekarno berbicara di hadapan berbagai kalangan pada malam 28 Oktober 1958 di Istana Negara Jakarta, Sumpah Pemuda telah berkembang menjadi "janji suci" terhadap persatuan.¹⁷ Para tokoh PRRI/Permesta dianggap melanggar "janji suci" sehingga Soekarno memandang mereka bukan hanya penyeleweng atau penghianat tapi juga selayaknya memohon ampun kepada Tuhan.¹⁸

¹⁷ Sejak tahun 1957, Sumpah Pemuda diagung-agungkan sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Lihat Foulcher, Keith. *Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Penciptaan Atas Sebuah Simbol Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Komunitas Bambu, 2000, h. 31-4.

¹⁸ Soekarno menyatakan, "Kita Saudara-Saudara terharu dan bergembira pada ini malam. Jah, terharu dan bergembira, memperingati 'Sumpah Pemuda' yang telah 30 tahun. Semua kita berkumpul disini. Jang dari Sumatera, jang dari Djawa, jang dari Kalimantan, jang dari Sulawesi, jang dari Nusa Tenggara, jang dari Maluku, jang dari Irian Barat, hanja jang tidak hadir disini ialah penjeleweng-penjeleweng dan penghianat-penghianat. Tidak hadir di sini dan tidak bisa hadir disini, orang-orang seperti Achmad Husein dan Simbolon; tidak bisa disini orang-orang seperti Somba dan Warouw. Kalau saja menjadi mereka, menjadi Achmad Husein, mendjadi Simbolon, mendjadi Sjafruddin Prawiranegara, mendjadi Somba, mendjadi Warouw ditengah hutan sekarang ini, saja akan merebahkan saja punja badan, menangis terhadap kepada Allah SWT, mohon ampun. Ampun, bahwa telah njeleweng. Ampun, bahwa telah menjalahi sumpah pemuda,

Pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuasaan politik menjadi terpusat kepada figur Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) dan militer sebagai kekuatan penyeimbang. Pemerintah mengategorikan organisasi-organisasi di masyarakat sebagai pendukung revolusi dan kontra-revolusi. Partai politik dibatasi sehingga hak berorganisasi hanya dapat disalurkan kepada organisasi-organisasi politik yang diakui. Pers diawasi ketat. Wacana yang berkembang di media massa berkaitan dengan jargon revolusi. Namun, sejumlah isu nasional menyatukan pers dalam menyebarkan gagasan kesadaran nasional, seperti pembebasan Irian Barat dan "Ganyang Malaysia".

Selama periode awal kemerdekaan hingga era Demokrasi Terpimpin, pemerintah mengandalkan RRI untuk memobilisasi opini publik. RRI berpengaruh dalam menyampaikan informasi kepada komunitas nasional, baik melalui pendengar langsung maupun para tokoh formal/ informal di masyarakat. Di tengah sebagian rakyat yang buta huruf serta karakteristik radio yang audio dan kemampuannya dalam menyampaikan pesan secara lebih cepat membuat media elektronik ini sangat diandalkan dalam menyebarkan informasi. Adapun keberadaan media massa cetak tetap menunjukkan tingkat sebaran kaum berpendidikan. Banyak media massa juga masih menjadi corong partai menyuarakan kepentingannya.

Hingga terbentuknya Orde Baru pada pertengahan 1960-an, terdapat 39 stasiun RRI di seluruh Indonesia menyiarkan kepada lebih dari satu juta perangkat radio berlisensi. Dengan tingkat melek huruf yang sangat rendah dan tanpa televisi, RRI merupakan medium pemerintah paling terpusat dan utama.¹⁹ Kemudian sepanjang tahun 1970-an tingkat kepemilikan radio meningkat pesat²⁰ Meski saat itu sudah ada

menghianati sumpah pemuda." Arsip Nasional Republik Indonesia No. 28: Pidato PJM Presiden Sukarno Pada Hari Peringatan "Sumpah Pemuda" Pada Tanggal 28 Oktober 1958 di Istana Negara, Djakarta, h. 1-2.

¹⁹ Lihat Sen, Krishna dan David T. Hill. *Media, Budaya, dan Politik di Indonesia, op.cit., h. 96*. Indonesia tidak memiliki siaran televisi hingga 1962. Pada tahun 1965 televisi baru dimiliki oleh kalangan terbatas di masyarakat. Pengaruh RRI yang sangat kuat terlihat pada Peristiwa 1965, di mana Letkol Untung maupun Mayjen Soeharto sama-sama memanfaatkan RRI.

²⁰ Antara 1970 dan 1980 jumlah pesawat radio yang digunakan meningkat lebih enam kali lipat dari 2,5 juta pesawat menjadi 15 juta pesawat, lalu menjadi 28,8 juta pesawat pada 1994. Peningkatan kepemilikan radio terjadi bersamaan dengan perluasan di bidang pasar barang-barang konsumen umumnya. Tapi angka kepemilikan radio per kepala dibandingkan jumlah penduduk lebih rendah di wilayah pedesaan/pedalaman

televisi milik pemerintah (TVRI), namun pada awal Orde Baru kepemilikan televisi anggota masyarakat masih sangat terbatas.

Ketimpangan pembangunan ekonomi yang dilahirkan zaman Orde Baru juga membuat kepemilikan media cetak dan sebaran sirkulasinya terpusat di kota-kota besar.²¹ Dengan kondisi media cetak yang terpusat itu, sulit diharapkan perannya untuk menyebarkan gagasan kesadaran nasional secara merata. Media massa di masa Orde Baru diarahkan untuk mendukung program pembangunan pemerintah.

Dalam menyebarkan gagasan kesadaran nasional, yang berperan para pemimpin formal dan informal, serta saluran antarpribadi lain di pelosok-pelosok.²² Dengan pengontrolan arus informasi dari pusat, dapat diperkirakan komunikasi pembangunan lebih bersifat monologis ketimbang dialogis, sehingga aspirasi-aspirasi lokal menjadi kurang terserap.

Situasi dan kondisi politik sejak akhir era 1980-an ditandai wacana keterbukaan politik. Pers ikut berperan mendorong munculnya wacana keterbukaan. Dengan segala keterbatasannya, sebagian kalangan di masyarakat mulai berani bicara politik secara kritis dan mencari saluran politik alternatif. Isu demokratisasi dan keterbukaan sudah menjadi wacana di kalangan sipil dan militer. Dalam batas tertentu, pers,

mahasiswa, dan kalangan LSM mulai berani bersikap kritis terhadap pusat kekuasaan. Sebagian kalangan pengusaha dan profesional juga mulai mempermasalahkan sentralisasi penguasaan sumber-sumber ekonomi.

Sejak era 1990-an akses penduduk terhadap media massa menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini terutama berkat kehadiran stasiun televisi swasta (lihat tabel). Namun dari segi isi, perkembangan televisi lebih menjadi etalase persaingan untuk memperoleh rating dengan menampilkan lebih banyak program hiburan yang sesuai dengan keinginan pasar.²³ Dari segi kepemilikan, stasiun-stasiun televisi swasta dikuasai oleh keluarga Presiden Soeharto dan kalangan dekatnya. Hal itu melanjutkan pola kepemilikan kelompok pers besar yang dikuasai kalangan yang dekat dengan kekuasaan.²⁴ Dalam menjalankan fungsi informasi, bersama media lain, televisi tetap diawasi ketat oleh pemerintah.

Setelah sentralisme kekuasaan Orde Baru runtuh tahun 1998, tuntutan terhadap ditegakkannya kedaulatan rakyat meluas. Kebebasan politik tidak dapat dibendung. Rakyat bebas menyuarakan pilihan politiknya dalam pemilu, bebas menentukan apa partai dan ideologi politiknya (kecuali komunisme), serta siapa presidennya. Undang-Undang Dasar 1945 yang di masa Orde Baru disakralkan mengalami 4 kali amandemen dalam kurun waktu 1999-2002.

Kehidupan pers juga menemukan kebebasannya tanpa adanya kekhawatiran pencabutan izin terbitnya oleh pemerintah. Sebelum reformasi, jumlah penerbitan surat kabar harian dan berkala hanya 217 buah, pada tahun 2000 melonjak menjadi sekitar 1500 buah.²⁵

Indonesia. Adapun dari segi isi, program-program radio yang paling populer cenderung berbentuk hiburan. Lihat Sen, Krishna dan David T. Hill. *Media, Budaya, dan Politik di Indonesia*, *op.cit.*, h. 105-6.

²¹ Angka penjualan surat kabar menyiratkan dominasi pasar yang semakin meningkat oleh surat-surat kabar yang berlokasi di Jakarta. Pada 1991, dengan 6% populasi nasional, Jakarta memiliki 67,2% sirkulasi media cetak di tanah air (dari 13.642.000 eksemplar) dan 47% dari 270 nama penerbit. Sampai tahun 1996, sirkulasi di Jakarta naik menjadi 71,6% dan 49% jumlah penerbit, meningkat hingga lebih 6,5% (600 ribu eksemplar), sementara sirkulasi di seluruh negeri malah turun hingga 105 ribu antara tahun 1995-1996 dan lebih dari 430.300 antara 1991-1996. Dari 8 surat kabar yang secara resmi berhenti terbit pada 1996, 7 surat kabar adalah penerbitan daerah. Sen, Krishna dan David T. Hill. *Media, Budaya, dan Politik di Indonesia*, *op.cit.*, h. 78.

²² Hasil penelitian Universitas Hasanuddin dan Departemen Penerangan tahun 1985 di desa pantai di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Maluku Tengah menunjukkan bahwa mayoritas saluran komunikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi pembangunan adalah melalui antarpribadi sebesar 81,9%. Adapun informasi melalui media massa hanya 18,1%. Yang dimaksud saluran komunikasi antarpribadi adalah tokoh formal (33,6%) dan informal (13,9%), penyuluh (11,6%), juru penerangan (5,9%), teman sekerja, sahabat, dan tetangga. Tokoh formal adalah tokoh setempat yang memiliki jabatan pemerintahan seperti kepala desa dan camat. Adapun saluran media massa mencakup radio (7,8%), TV (5,5%), surat kabar/ majalah (3,6%), kaset (0,6%), pamflet/ poster (0,4%), dan film (0,2%). Achmad, A.S. dan S.S. Ecip (ed). *Komunikasi dan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985, h. 131-153.

²³ RCTI memulai siaran pada akhir 1980-an dengan hampir 90% program impor, sebagian besar dari Amerika Serikat (yang 10% merelai dari TVRI). Meski proporsi program asing di televisi swasta berkurang dengan cukup pesat, tapi sebagian besar stasiun mengakui hanya 35-40% materi lokal. Sen, Krishna dan David T. Hill. *Media, Budaya, dan Politik di Indonesia*, *op.cit.*, h. 139.

²⁴ Di antara 16 kelompok pers besar tahun 1990-an, 9 di antaranya berhubungan sangat erat dengan istana atau organisasi besar yang tengah berkuasa. Kebanyakan kelompok pers itu tumbuh secara signifikan pada 1980-an, ketika kepentingan mengontrol konglomerat media dipandang sebagai sumber pengaruh politik dan ekonomi. Sen, Krishna dan David T. Hill. *Media, Budaya, dan Politik di Indonesia*, *op.cit.*, h. 70-1.

²⁵ Oetama, Jacob. "Hukum, Etika, dan Kebebasan Pers" dalam Seminar Hukum, Etika, dan Kebebasan Pers, Media Development Center di Jakarta, 6 Juni 2000.

Tabel Akses Penduduk 10 Tahun ke Atas Terhadap Media Massa (1993-2003)

No	Akses Terhadap Jenis Media	1993	1994	1996	1997	1998	2000	2003
1	Persentase Penduduk yang Mendengarkan Radio	63,59	63,91	50,46	59,17	64,52	43,72	50,29
2	Persentase Penduduk yang Menonton Televisi	64,77	69,43	69,31	78,22	88,72	87,97	84,94
3	Persentase Penduduk yang Membaca Koran/ Majalah	23,31	23,15	18,33	22,83	28,36	17,47	22,06

Sumber : <http://www.bps.go.id/sector/socwel/table3.shtm/>

Namun penyebaran media cetak tetap masih cenderung terpusat di kota-kota besar di Pulau Jawa. Adapun TVRI dan RRI, setelah lama menjadi "corong pemerintah", kini kian ditinggalkan pemirsa. Sedangkan media cetak dan elektronika milik swasta, setelah lepas dari pengontrolan ketat pemerintah, di era reformasi faktor kepemilikannya yang dikuasai pemodal besar tidak jarang pemberitaannya didominasi kepentingan ekonomi dan politik mereka. Isi dan akses media juga lebih banyak ditujukan untuk kepentingan persaingan pasar sehingga program-program hiburan yang tidak mendidik kerap menghiasi layar kaca.

4. Kesimpulan dan Saran

Pada masa pergerakan, perkembangan kesadaran nasional dilakukan kalangan terdidik. Kebanyakan dari mereka berasal dari golongan priyayi, golongan kecil orang-orang profesional di kota-kota besar, dan keluarga pedagang luar pulau Jawa. Digunakannya bahasa Melayu (Indonesia) dan bukannya bahasa Belanda sebagai bahasa persatuan cukup menarik karena sebetulnya para pemuda dari berbagai suku ini adalah sama-sama kaum terdidik yang terbiasa menggunakan bahasa Belanda. Di tengah keinginan untuk menyambut zaman baru menuju kemerdekaan, bahasa Melayu yang egaliter cocok untuk mempersatukan para pemuda dari berbagai latar belakang.

Media massa cetak merupakan cermin perkembangan masyarakat. Pola sebaran dan pembacanya bersifat elitis, menunjukkan perkembangan sebaran jaringan kelompok-kelompok elite terdidik yang masih sangat terbatas. Penyebaran kesadaran nasional belum merata hingga ke pelosok daerah. Organisasi-organisasi bentukan Jepang, terutama organisasi militer PETA, dan perlawanan-perlawanan rakyat di zaman Jepang, justru berperan menyebarkan kesadaran nasional secara luas.

Di era kemerdekaan, media massa cetak juga tetap menunjukkan sebaran kalangan terdidik yang hingga kini masih cenderung terpusat di kota-kota besar di Pulau Jawa. RRI sempat

berperan besar menyebarluaskan kesadaran nasional. Kemudian TVRI digunakan tidak hanya dalam penyebaran kesadaran nasional namun juga bermuatan kepentingan pemerintahan menyosialisasikan konsepsi kebijakan politik dan ekonominya.

Media massa sempat mengalami pengawasan ketika pada Demokrasi Terpimpin pemerintah mengategorikan organisasi-organisasi di masyarakat sebagai pendukung revolusi dan kontra-revolusi. Di masa Orde Baru pengekangan terhadap kebebasan pers membuatnya sulit mengkritisi kebijakan politik pemerintah dan ketimpangan pembangunan yang dihasilkannya. Kebebasan di era reformasi juga dinikmati kalangan pers.

Klaim Benedict Anderson yang menekankan pentingnya keunggulan kapitalisme, terutama kapitalisme cetak, dalam menyebarkan gagasan kesadaran nasional hanya berlaku terbatas. Media massa cetak merupakan cermin perkembangan masyarakat. Pola sebaran dan pembacanya tidak merata ke seluruh pelosok Indonesia. Peran tokoh masyarakat diperlukan melalui komunikasi partisipatif untuk menyerap aspirasi-aspirasi lokal dalam usaha menyebarkan kesadaran nasional.

Budaya baca masyarakat Indonesia juga masih rendah. Ketika budaya baca belum tinggi, televisi swasta berkembang, sehingga masyarakat jauh lebih banyak menonton televisi ketimbang membaca koran/ majalah. Untuk ikut membantu menyebarkan kesadaran nasional di tengah kompetisi media, stasiun televisi swasta harus terus mencari keseimbangan dalam usaha akumulasi modal tanpa mengorbankan misi idealisme mencerdaskan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A.S. dan S.S. Ecip (ed) (1985). *Komunikasi dan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Adam, Ahmat (2003). *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*, Jakarta: Hasta Mitra, Pustaka Utan Kayu, dan Perwakilan KITLV-Jakarta.
- Anderson, Benedict (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso.
- Anderson, Benedict (1998). *The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia and the World*. London: Verso.
- Arsip Nasional Republik Indonesia No. 28: Pidato PJM Presiden Sukarno Pada Hari Peringatan “Sumpah Pemuda” Pada Tanggal 28 Oktober 1958 di Istana Negara, Djakarta
- Foulcher, Keith (2000). *Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Penciptaan Atas Sebuah Simbol Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Komunitas Bambu.
- Hering, Bob (2003). *Soekarno Bapak Indonesia Merdeka, Sebuah Biografi 1901-1945*, Jakarta: Hasta Mitra.
- Kahin, George McT (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press.
- Kusuma Sumantri, Iwa (1963). *Sejarah Revolusi Indonesia: Masa Perjuangan Sebagai Perintis Revolusi (Jilid Pertama)*, Jakarta: (tanpa penerbit).
- Lev, Daniel S and Ruth McVey (eds) (1996). *Making Indonesia: Essays on Modern Indonesia in Honor of George McT. Kahin*, Ithaca, NY: Cornell University.
- Maters, Mirjam (2003). *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial Antara Kebebasan dan Pemberangusan 1906-1942*, Jakarta: Hasta Mitra, Pustaka Utan Kayu, dan KITLV.
- Pringgodigdo, AK (1986). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Sen, Krishna dan David T. Hill (2001). *Media, Budaya, dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan PT Media Lintas Inti Nusantara.
- Shiraishi, Takashi (1990). *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926*, Ithaca: Cornell University Press, 1990.
- Tirtoprodjo, Susanto (1982). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, Jakarta: PT Pembangunan Jakarta.
- Lain –lain:
- Oetama, Jacob. “*Hukum, Etika, dan Kebebasan Pers*” dalam *Seminar Hukum, Etika, dan Kebebasan Pers*, Media Development Center di Jakarta, 6 Juni 2000.

**Dr. Retor AW Kaligis, M.Si.*

Menyelesaikan S1 di Jurusan Jurnalistik, FIKOM, Universitas Padjadjaran (1994), S2 Sosiologi, Manajemen Pembangunan Sosial-FISIP, Universitas Indonesia (2003), dan S3 Sosiologi-FISIP, Universitas Indonesia (2010). Ia juga aktif sebagai Koordinator Link (Lingkaran Komunikasi) Nusantara, organisasi kajian yang menggali akar sosio-historis Nusantara untuk membahas fenomena kemasyarakatan aktual di Indonesia.

Email : retor_awk@yahoo.com